
SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK SURIAH PASCA ARAB SPRING 2012-2014

Irsyan Bastian¹

¹International Relations Department, Social & Political Science Faculty, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Bantul, DIY, 55183
irsybastian@gmail.com

Abstract

This thesis explains how to the United States of America responses towards the conflict that occurred in Syria after the Arab Spring. Syria became the next country to receive the impact of the Arab World Revolution after the Arab countries such as Tunis, Libya and Egypt. The Syrian conflict became a very complex conflict, because of the involvement of external parties such as terrorist groups and the United States of America who supported the Free Syrian Army and Syrian National Coalition opposition groups to overthrow the Bashar al-Assad regime and realize the country's national interest through Middle East foreign policy especially in Syria.

Keywords: US, Syria, Arab Spring, National Interest, Foreign Policy, FSA, SNC.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap konflik yang terjadi di Suriah pasca *Arab Spring*. Suriah menjadi negara selanjutnya yang menerima dampak Revolusi Dunia Arab setelah negara-negara Arab lainnya seperti, Tunisia, Libya dan Mesir. Konflik Suriah menjadi konflik yang sangat kompleks karena keterlibatan pihak eksternal seperti kelompok teroris dan Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi *Free Syrian Army* dan *Syrian National Coalition* demi menjatuhkan rezim Bashar al-Assad serta mewujudkan kepentingan nasional negaranya melalui politik luar negeri di Timur Tengah khususnya di Suriah.

Kata kunci: AS, Suriah, Arab Spring, Kepentingan Nasional, Politik Luar Negeri, FSA, SNC.

INTRODUCTION

Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Internasional. Politik luar negeri Amerika menjadi hal yang dinantikan oleh setiap negara yang bermitra dengan negara adidaya tersebut. Bukan hanya negara yang menjadi mitra Amerika, negara yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan Amerika ataupun negara yang menjadi saingan Amerika dalam dunia Internasional juga menantikan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh negara Paman Sam tersebut.

Politik luar negeri Amerika juga menjadi perhatian khusus bagi negara-negara yang berada di semenanjung Arab. Banyak dari negara yang berada di kawasan Timur Tengah mempunyai hubungan baik dengan negara Amerika. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian dari politik luar negeri Amerika. Politik luar negeri Amerika terhadap kawasan yang mayoritas berpenduduk Muslim ini sudah berlangsung lama. Amerika dikenal mempunyai kepentingan dari sektor ekonomi dan penyebaran ideologi negaranya (Gerges, 2002).

Banyak negara Timur Tengah yang berafiliasi dengan Amerika. Akan tetapi, Tidak semua negara yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika dapat mempertahankan stabilitas negaranya. Negara seperti Tunisia, Libya dan Mesir merupakan negara yang sebelumnya berada dibawa rezim pemerintahan otoriter, seperti halnya rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir dan Khadafi di Libya. Negara-negara ini dikenal mempunyai hubungan baik dengan Washinton. Sampai pada akhirnya gelombang demonstran menuntut mereka turun dari jabatannya. Gelombang revolusi menerjang Timur Tengah, hal tersebut memberikan dampak buruk terhadap kepentingan Amerika. Washinton secara hati-hati mengambil tindakan, Amerika tidak mau mengambil resiko dengan mempertahankan rezim yang sudah diambang kehancuran.

Angin revolusi menerjang negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2010 hingga awal tahun 2011. Gelombang revolusi dunia Arab atau *Arab Spring*, merupakan serangkaian peristiwa gelombang revolusi yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah yang dianggap diktator dalam kepemimpinannya. Maret 2011, hembusan angin revolusi sampai di Suriah. Bukan Damaskus dan Aleppo akan tetapi perjuangan rakyat Suriah berawal dari kota yang berjarak 100 kilometer sebelah selatan Damaskus, di Suriah barat-daya. Deraa merupakan ibu kota Provinsi Deraa yang berpenduduk sekitar 70.000-100.000 jiwa. Dari kota inilah semangat revolusi di Suriah bermula. Perlawanan rakyat Suriah dimulai ketika aparat keamanan menangkap 15 orang siswa, demonstrasi menuntut pembebasan 15

siswa tersebut merupakan awal pergerakan dimulainya perjuangan rakyat melawan pemerintah (Kuncahyono, 2013).

Perang yang sedang terjadi di Suriah bukan hanya melibatkan kelompok pemberontak dan pemerintahan, tetapi pihak asing yang mempunyai kepentingan juga ikut terlibat. Walaupun pada kenyataannya yang berperang di lapangan adalah kelompok pemberontak melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Amerika salah satu negara yang terlibat dalam kontestasi di Suriah. Hal ini terbukti dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Obama yang menjabat pada saat itu menyatakan bahwa,

“The United State opposes the use of violence against peaceful protesters in Syria, and we support the universal rights of the Syrian people. We have imposed sanctions on President Assad and his government (HOUSE, 2011)

Berdasarkan pernyataan oleh Obama, Amerika memberikan perhatian kepada konflik Suriah. Tindakan Presiden Assad menurut Amerika sebagai tindakan yang melanggar kepentingan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, bahkan Amerika dan sekutunya mengecam tindakan brutal Assad. Amerika yang selama ini dianggap sebagai negara yang pro serta mendukung kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya tidak akan tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Suriah (Indonesia, 2012).

Amerika yang menganggap konflik di Suriah merupakan hal penting dapat dilihat dari politik luar negeri negara yang berjudul Paman Sam tersebut. Amerika yang membentuk kelompok oposisi baru bagi Suriah dan secara sepihak melegalkannya sebagai pemerintahan yang sah. Selain itu, Amerika juga memberikan dukungan berupa persenjataan dan pelatihan militer terhadap kelompok oposisi Free Syrian Army dan Syrian National Coalition. Disisi lain jika pihak oposisi mendapat dukungan dari Amerika maka pihak Assad juga mendapatkan dukungan dari musuh bebuyutan Amerika yaitu Rusia.

Rusia dan Suriah dikenal mempunyai hubungan baik yang telah terjalin begitu lama. Hubungan kedua negara ini ditandai dengan adanya pangkalan militer Rusia yang sudah ada sejak tahun 1963 di kota pelabuhan Tartus. Sejarah mencatat bahwa, Rusia yang pada saat itu masih bernama Uni Soviet merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Kerjasama mereka semakin membaik setelah Hafez al-Assad menjabat sebagai Presiden. Menurut Rusia, Suriah merupakan mitra utama mereka dalam mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Dukungan yang diberikan Rusia berupa peralatan militer, bantuan ekonomi serta dukungan politik di pentas Internasional. (Kompas.com, 2012).

Konflik Suriah memasuki babak baru. *Arab Spring* sudah berakhir, akan tetapi musim semi belum juga berakhir. Kini konflik Suriah tidak hanya berbicara tentang perlawanan masyarakat terhadap pemerintah, pertarungan kepentingan antara tokoh-tokoh ternama dunia Internasional menjadi kisah baru yang mewarnai perang berkepanjangan ini. Amerika dan Rusia menjadi dua aktor penting yang mengambil peran vital dalam krisis di Suriah. Amerika di pihak oposisi dan Rusia di pihak pemerintah membuat kontestasi di Suriah semakin memanas.

METHODS OF RESEARCH

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan eksplorasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah berdasarkan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, telaah Pustaka (*library research*). Penulis akan mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari literatur berupa buku, makalah, koran, artikel, jurnal, dokumen, serta situs-situs resmi yang mengkaji politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya di Suriah ataupun sumber yang terkait dengan penelitian.

3. Jenis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan penulis diatas, maka penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Data ini kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa data kualitatif. Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.

THEORETICAL FRAMEWORK

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua konsep yang dianggap saling berkaitan seta bisa menjawab fenomena keterlibatan Amerika Serikat di Suriah.

1. Konsep Politik Luar Negeri
2. Konsep Kepentingan Nasional

RESULT AND ANALYSES

Konflik Suriah merupakan salah satu fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah. Suriah bukan negara pertama yang menerima dampak dari gelombang revolusi ini. Negara-negara seperti Mesir, Libya, Tunisia merupakan negara yang sudah merasakan dampak dari angin revolusi yang menerjang dunia Arab. Fenomena *Arab Spring* merupakan suatu fenomena yang berlangsung di kawasan Timur Tengah pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena Arab Spring. Pertama, karena Timur Tengah memiliki kultur budaya yang sama yaitu bangsa Arab. Kaum Muslim mendominasi dan dulunya berjaya namun kemudian terpecah belah dalam beberapa negara.

Negara-negara di kawasan Timur Tengah merupakan bekas negara jajahan bangsa Eropa seperti Prancis dan Inggris. Kedua, negara-negara Timur Tengah meskipun telah menjadi negara yang merdeka, namun pada dasarnya belum seutuhnya menjadi negara yang merdeka. Kebebasan masyarakat dibatasi dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan penguasa yang diktator yang berlangsung di beberapa negara Timur Tengah (Phillips, 2012).

Ketiga, beberapa negara di Timur Tengah masih mengalami kemiskinan dan masalah pada jumlah pengangguran yang tinggi. Kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi walaupun Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya terutama minyak. Keempat, Adanya undang-undang darurat memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintah untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan terhadap segala tindakan yang dilakukan serta dianggap mengancam keamanan nasional.

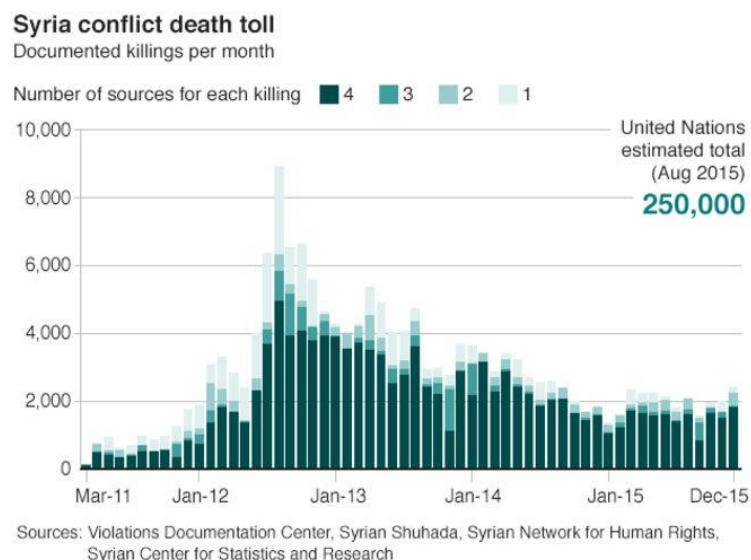
A. Krisis Suriah

Maret 2011, hembusan angin revolusi sampai di Suriah. Bukan Damaskus dan Aleppo akan tetapi perjuangan rakyat Suriah berawal dari kota yang berjarak 100 kilometer sebelah selatan Damaskus, di Suriah barat-daya. Deraa merupakan ibu kota Provinsi Deraa yang berpenduduk sekitar 70.000-100.000 jiwa. Dari kota inilah semangat revolusi di Suriah bermula. Perlawanan rakyat Suriah dimulai ketika aparat keamanan menangkap

15 orang siswa, demonstrasi menuntut pembebasan 15 siswa tersebut merupakan awal pergerakan dimulainya perjuangan rakyat melawan pemerintah. (Kuncahyono, 2013)

Serangkaian peristiwa aksi demonstran yang terjadi di beberapa wilayah di Suriah menuntut Bashar al-Assad untuk mundur dari tapak kekuasaannya. Respon penolakan diberikan oleh Bashar al-Assad untuk mundur dari jabatannya. Demi menjaga legitimasi pemerintahannya Assad menganggap para demonstran tersebut sebagai pemberontak yang mengancam keamanan negara. Bashar al-Assad mulai melakukan tindakan kekerasan kepada para demonstran di beberapa wilayah di Suriah. Pemerintah juga mulai mengirimkan tank ke seluruh penjuru kota dan mendesak para demonstran agar menghentikan aksi mereka. Kehadiran militer dalam aksi protes dan demonstrasi tidak banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan secara damai. Akibat aksi tersebut, banyak korban yang berjatuh dan menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah serta menjadikan Suriah sebagai negara darurat perang (Anderson, 2015).

Melalui aksi yang dilakukan rakyat Suriah, pihak pemerintah melalui aparat keamanan merespon dengan menembakkan peluru dan gas air mata. Tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap kelompok demonstran menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh. Organisasi *Human Right* melakukan kecaman atas tindakan Bashar al-Assad yang telah menewaskan banyak warga sipil.



Source : *Syria, the story of the conflict* bbc.com

Berdasarkan laporan UN pada Juni 2013, tercatat konflik di Suriah telah menewaskan 90.000 korban jiwa dan pada bulan Agustus jumlah korban meningkat menyentuh angka

250.000 korban. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa intensitas konflik Suriah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhannya menempatkan Suriah sebagai negara berbahaya (NEWS, 2016).

Pada 29 Juli 2011, sebuah kelompok oposisi senjata moderat membentuk tentara pembebasan Suriah atau dikenal dengan *Free Syrian Army* (FSA). Kelompok ini berdiri untuk menanggapi kekerasan dan membebaskan warga Suriah dari rezim Assad. FSA terbentuk saat demonstrasi damai di Suriah direspon dengan kekerasan dari pasukan pemerintah. Kelompok tersebut berkembang dengan adanya sukarelawan yang bergabung dalam kelompok. Tujuan utama dari FSA selain mempertahankan wilayah, tujuan mereka yaitu untuk menggulingkan rezim Assad (extract, 2018).

B. Dukungan Amerika terhadap kelompok oposisi

Kondisi yang tengah berlangsung dengan berbagai aksi protes masyarakat diseluruh penjuru Suriah, kemudian dapat dimanfaatkan berbagai kelompok oposisi pemerintah yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Dengan membentuk kelompok oposisi dengan berbagai afiliasi yaitu pertama, kelompok-kelompok oposisi yang menginginkan pergantian rezim dan menganggap perjuangan mereka sebagai agenda jihad. Demi mendirikan negara khiafah yang berafiliasi dengan al-Qaeda, seperti yang terkuat yaitu Jabhah al-Nursah bersama dengan kelompok jihad lain telah mendeklarasikan pembentukan Brikade Koalisi Pendukung khilafah.

Kedua, kelompok oposisi yang tergabung ke dalam FSA (*Free Syrian Army*). Dimana FSA didukung oleh koalisi oposisi yang bermaskas di Doha, SNC atau sekarang disebut SNCORF (*Syrian National Coalition for Operation and Revolutionary Forces*) (Sulaeman, 2013). Ketiga, kelompok-kelompok oposisi anti-kekerasan, anti-sektarianisme, dan anti-intervensi militer asing yang berafiliasi ke dalam koalisi bernama *National Coordination Body for Democratic Change*. Kelompok-kelompok tersebut dengan berbagai afiliasinya secara nyata mendapat dukungan besar dari negara adidaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam upaya mengganti rezim berkuasa di Suriah terutama kelompok koalisi nasional yaitu SNC dan FSA yang secara jelas mendapatkan pengakuan sebagai oposisi sah menurut Amerika dalam konflik yang terjadi serta melibatkan banyak kelompok lain (Bahar, 2014).

Masuknya kekuatan asing seperti Amerika Serikat menjadikan situasi konflik di Suriah semakin memanas. Tidak tanggung-tanggung keterlibatan Amerika kali ini bukan sekedar bentuk kecaman yang disampaikan dalam pidato negara. Akan tetapi, Amerika melibatkan diri secara langsung dengan memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi yang sedang bertarung melawan rezim Bashar al-Assad. Kelompok tersebut yakni *Free Syrian Army* dan *Syrian National Opposition* yang juga diklaim oleh Amerika sebagai pemerintahan sah di Suriah saat ini. Menurut Amerika Assad bukan lagi pemerintahan sah Suriah akibat dari tindakan yang dilakukan. Serta, Amerika menganggap Assad dan sekutunya sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Suriah.

Amerika yang berupaya melibatkan diri dalam proses revolusi dalam krisis Suriah lebih mengarah pada tujuan kepentingan keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks dukungan AS terhadap kelompok oposisi Suriah, tentunya dapat diperkirakan bahwa AS sedang mencoba mencapai tujuan politiknya yaitu menanamkan pengaruh terhadap Suriah yang selama ini bisa diibaratkan sebagai “duri dalam daging” bagi AS atas kebijakannya di Timur Tengah khususnya menyangkut Israel dan pengembangan nuklir Iran. Dalam hal ini AS melihat bahwa adanya kebutuhan dari internal Suriah yaitu kelompok oposisi SNC dan FSA untuk mendapatkan sponsor guna mendukung dan mendanai kegiatan mereka, yang kemudian berkorelasi dengan kapabilitas AS untuk memobilisasi kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki untuk disalurkan ke medan pertempuran di Suriah.

C. Kebijakan Luar Negeri AS di Suriah Pasca *Arab Spring*

keterlibatan Amerika Serikat pada konflik yang terjadi di Suriah terdapat beberapa kepentingan politik luar negeri yang ingin dicapai pada konflik tersebut. Kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan keamanan merupakan agenda utama Amerika dibalik dukungan yang diberikan terhadap kelompok oposisi Suriah. Setelah beberapa pemaparan di atas terkait dengan agenda politik luar negeri dan kepentingan nasional, penulis mencoba memberikan daftar politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah pasca *Arab Spring* sebagai berikut.

1. *February 2012 (President suspends Embassy Operation), The United States suspended its Embassy operations in Damascus and withdrew U.S.Ambassador to Syria Robert S. Ford.*

2. *April 2012 (U.S. support for United Nations involvement), On April 14, 2012, the U.N. Security Council passed Resolution 2042, which approved the deployment of a U.N. advance team of 30 military observers to Syria. It also demanded that the Syrian authorities withdraw security force from population centers and begin a dialogue with the opposition. The vote marked the first time since protests began that the Security Council was united in demanding a halt to the violence. On April 21, the Security Council passed Resolution 2043, which established for a 90 days period a United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). The resolution also created a civilian team to help implement elements of the full peace plan, such as the start of a national political dialogue and the government's granting of the right to demonstrate.*
3. *June, 2012 (U.S.-Russia Endorsement of the Geneva Communique), On June 30 in Geneva, Switzerland, the Action Group on Syria (a group of countries which included the United Nations) issued a communique endorsing a U.N. proposed peace plan and calling for a transitional government of national unity in Syria that could include members of opposition and current regime. Such a transitional government would be charged with overseeing the drafting of the new constitution and national elections. In order to secure Russian support for the final statement, the Action Group stated that any transitional government "shall be formed on the basis of mutual consent," a phrase that would give supporters of Assad and the opposition veto power over the selection of unity government leaders.*
4. *Summer 2012 (President's report rejection of lethal aid), Various U.S. media sources have reported that in 2012, then Secretary of State Hillary Rodham Clinton and then CIA Director David Petraeus proposed a plan to provide lethal aid (with the assistance of some neighboring countries) to vetted rebel groups. Subsequent testimony that then Secretary of Defense Leon Armed Conflict in Syria: Background and U.S Response Congressional Research Service 18 Panetta also was in favor of this proposal, which reportedly ultimately rejected by the President.*
5. *August 2012 (The President on Regime Use of Chemical Weapons, On August 20, President Obama said, "we have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. We're monitoring that situation very carefully. We have put together a range of contingency plans".*

6. *December 2012, (Recognition of the Syrian Opposition), In order to help unify the log divided Syrian opposition, the United States and others facilitated the formation of the Syrian Opposition Coalition (SC) in November 2012 in Doha, Qatar. The United States extended recognition to the SC as the “legitimate representative of the Syrian people,” though it has not been legally recognized as the government of Syria.*
7. *December 2012 (Designation of Al Nursa Feont as an FTO), The United States designated Jadhah al Nursa, a Salafi-Jihadist militia and reported affiliate of Al Qaeda in Iraq, as Foreign Terrorist Organization, indicating that U.S. interests are not only threatened in the short term by the effects of the current fighting but could be threatened over the long term by the empowerment of extremist groups in Syria.*
8. *January 2013 (The President on the prospect of U.S. military intervention in Syria, In January 2013, interview with the New Republic, President Obama responded to a question on how he views the violence in Syria by saying: “And as I wrestle with those decisions, I am more mindful probably than most of not only our incredible strengths and capabilities, but also our limitations. In a situation like Syria, I have to ask, can we make a difference in that situation? Would a military intervention have an impact? How would it affect our ability to support troops who are still in Afghanistan? What would be the aftermath of our involvement on the ground? Could it trigger even worse violence or the use of chemical weapons? What offers the best prospect of a stable post-Assad regime? And how do I weigh tens of thousands who’ve been killed in Syria versus the tens of thousands who are currently being killed in the Congo?”*
9. *April 2013 (On alleged Syrian regime chemical weapon usage), On April 25, 2013, the White House issued a letter to Congress stating that “our intelligence community does assess with varying degrees of confidence that the Syrian regime has used chemical weapons on a small scale in Syria, specifically the chemical agent Sarin.”*
10. *May 2013 (Humanitarian Aid), On May 9, 2013, Secretary Kerry announced that the United States is contributing an additional \$100 million in humanitarian assistance, bringing total U.S. humanitarian assistance for those affected by the violence in Syria to nearly \$510 million.*
11. *June 2013 (Chemical Weapons Confirmation), On June 13, White House official confirmed the U.S. intelligence community’s assessment that “the Assad regime has used chemical weapons, including the nerve agent Sarin, on a small scale against the*

opposition multiple times in the last year.” In response to the assessment, the White House signaled its intent to expand U.S. assistance to the Syrian opposition, including the provision of unspecified support to the Supreme Military Council of the armed opposition.

12. *August 2013 (President’s Request to Congress for Authorization of Use of Force), On August 31, President Obama submitted a draft resolution requesting that Congress authorize the use of force for military operations “against Syrian regime targets” to “hold the Assad regime accountable for their use of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out”.*

Dari beberapa poin di atas dapat dilihat bentuk politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Suriah melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Pasca berakhirnya gelombang revolusi dunia Arab, beberapa negara telah sukses melakukan perubahan atas negaranya. Suriah menghadapi hal serupa akan tetapi, Suriah bukanlah Tunisia, Libya, dan Mesir rezim Suriah sangatlah kuat. Dukungan Rusia dan Cina membuat Suriah menjadi negara tangguh dalam menghadapi gejolak yang terjadi. Amerika dan sekutunya yang juga ikut terlibat merasakan ketangguhan rezim dalam menghadapi permasalahan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Amerika baik itu dalam bentuk kecaman, resolusi konflik, maupun dalam bentuk tekanan militer. Arab Spring telah berakhir konflik Suriah telah memasuki babak baru yang menarik perhatian para pelaku internasional.

D. Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Suriah

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. H.J. Morgenthau menyatakan bahwa, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Morgenthau H. J., 1951).

Kepentingan nasional Amerika dapat dilihat dari perumusan politik luar negerinya. Dalam konteks Timur Tengah, Amerika mempunyai beberapa poin kepentingan nasional yang dirumuskan dalam politik luar negerinya di Timur Tengah. Kepentingan ekonomi dan politik, kepentingan untuk mempertahankan eksistensi Israel, pemberantasan kelompok teroris untuk menjaga kedamaian dunia internasional, proses demokratisasi di Timur Tengah demi upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Berdasarkan

kepentingan umum Amerika di Timur Tengah, penulis akan menerapkan beberapa poin kepentingan Amerika dalam melihat krisis yang terjadi di Suriah.

1. Kepentingan Ekonomi

Salah satu kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah yakni mempertahankan akses strategis untuk minyak sebagai konsumsi pribadi dan untuk kepentingan negara yang beraliansi dengan AS. Amerika sebagai negara kapitalis maju yang perekonomiannya berbasis pada sektor industri mengharuskannya menjadi pengonsumsi bahan bakar fosil terbesar dunia terutama minyak bumi dan gas. Konsumsi energi di seluruh dunia masih didominasi oleh negara industri besar seperti Amerika, Cina, Rusia dan Jepang. Amerika Serikat sendiri merupakan konsumen terbesar energy dunia yang mencapai 2.331,6 juta ton minyak atau memakan lebih dari 22,8% dari seluruh konsumsi energi dunia (Muttaqiena, 2018).

Sudah sejak lama AS fokus terhadap pemenuhan energi untuk kebutuhan dalam negerinya, hal ini tergambar dalam kepentingan AS terhadap minyak Timur Tengah yang tertulis dalam dokumen pada tahun 1944. Departemen Luar Negeri AS menggambarkan Semenanjung Arab sebagai berikut: “Suatu sumber besar bagi kekuasaan strategis dan hadiah material terbesar dalam sejarah dunia”. Dalam pandangannya AS menyadari bahwa kendali terhadap minyak di kawasan itu adalah sarana untuk mengendalikan dunia dan mempertahankan peradaban mereka (Widjdi, 2010).

Dalam kaitannya dengan Suriah, AS sebenarnya tidak secara langsung mempunyai kepentingan ekonomi terhadap cadangan minyak Suriah yang bisa dibilang kecil dibanding negara-negara Arab lain di kawasan Timur Tengah. Tetapi, Suriah bukan tentang berapa banyak cadangan minyak dan gas yang bisa dikuasai AS. Lebih jauh lagi melihat keberadaan Suriah sebagai “jantung Timur Tengah” dimana anggapan bahwa jika dapat mengontrol Suriah maka akan mudah mengontrol jalur energi Timur Tengah. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, Suriah merupakan penghubung setiap daerah kaya minyak seperti Irak, Iran menuju laut mediterania yang dapat langsung dikirim ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Jika dapat menguasai Suriah secara keseluruhan sama artinya dengan menguasai cadangan gas terbesar dunia yang baru saja ditemukan. Kalimat tersebut menunjukkan seberapa pentingnya peran Suriah dalam jalur pandangan di Timur Tengah. Hal itu bukan tanpa alasan, wilayah Suriah terdapat banyak jalur pipa minyak

dan gas yang pendistribusiannya harus melalui Suriah. Selain itu, Suriah juga sudah lama menjadi tempat transit jalur perdagangan minyak di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan lokasi Suriah yang strategis dan didominasi oleh daratan landai yang luas sehingga akan sangat efektif sebagai jalur pipa gas ataupun pengiriman minyak bumi. Maka dari itu Amerika Serikat mendukung kelompok oposisi SNC dan SFA dengan tujuan bisa menanamkan pengaruhnya serta bisa memonopoli jalur perdagangan Timur Tengah yang melewati Suriah.

Dukungan AS terhadap kelompok oposisi benar-benar bermotif kepentingan ekonomi. Hal itu dapat dibuktikan ketika konflik semakin meruncing ada indikasi bahwa kelompok-kelompok oposisi dukungan AS berupaya menyerang fasilitas-fasilitas energi Suriah seperti pipa gas dan minyak. Seperti yang terjadi di kota Homs, dimana sekelompok pemberontak meledakan pipa minyak dari timur Suriah yang menuju kilang minyak kota Homs.

Hal tersebut sejalan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yakni mempertahankan akses strategis untuk minyak dan membeli klien negara. Kedua hal ini merupakan kepentingan nasional Amerika yang dicetuskan melalui politik luar negerinya di Timur Tengah. Dalam konflik Suriah, dijelaskan sebelumnya bahwa Suriah merupakan wilayah jalur pipa gas dan minyak serta pelabuhan tempat transit kapal-kapal angkutan minyak yang akan dikirim ke pasar Amerika dan Eropa. Amerika berupaya menguasai kedua faktor tersebut demi mewujudkan tercapainya kepentingan nasional negaranya dalam hal kepentingan ekonomi.

A. Kepentingan Politik

Selain kepentingan ekonomi kepentingan politik juga menjadi tujuan utama Amerika terlibat dan mendukung kelompok oposisi pada konflik Suriah. SNC dan SFA dipandang sebagai kelompok yang potensial bagi AS sebagai alat untuk menanamkan pengaruhnya di Suriah. Sehingga, AS bisa dengan mudah mencapai kepentingan lainnya di Suriah. Dari sekian banyak kepentingan yang bisa dicapai AS dengan berkejarannya Suriah, terdapat dua kepentingan yang menjadi prioritas AS di Suriah yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan utama yang ingin dicapai oleh AS dengan mendukung SNC dan SFA adalah untuk dapat menggulingkan rezim Assad. Dimana hal ini merupakan langkah atau seperangkat tindakan yang dilakukan AS untuk memperoleh pengaruh di Suriah.

Mengapa kemudian yang didukung oleh AS adalah SNC dan SFA, hal ini cukup beralasan karena dari pandangan AS keduanya dianggap sebagai kelompok

yang berpotensi besar untuk mempengaruhi kondisi perpolitikan Suriah. Hal tersebut dikarenakan mereka merupakan bagian internal dari negara Suriah yang telah memiliki kelembagaan yang lebih terorganisir dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang ada. Serta, kedua kelompok ini membuka peluang untuk keterlibatan asing di Suriah karena sebagian besar anggota SNC juga berdomisili di luar Suriah, sehingga dilihat dari sudut pandang internasional keduanya tidak dapat dinilai sebagai kelompok ekstrimis ataupun digolongkan sebagai teroris yang nantinya dapat membahayakan kepentingan dan agenda AS dan Eropa di Suriah.

Sikap AS yang mendukung kedua kelompok ini berdasarkan pemikiran bahwa unsur yang paling dapat mempengaruhi kondisi suatu negara adalah warga negaranya sendiri. Dimana warga negara dapat mempengaruhi arah kebijakan atau keberlangsungan rezim yang ada di negaranya, dan pengaruh bisa lebih kuat jika setiap kelompok bersatu dalam kekuatan kolektif. Maka dari itu, kemudian SNC dan FSA beraliansi sesuai dorongan AS, Prancis, negara-negara Arab, dan negara Eropa lainnya. Ketika konflik baru beberapa bulan berlangsung SNC yang diakui oleh AS dan sekutunya sebagai perwakilan resmi atau kelompok oposisi sah di Suriah pernah menghimbau dunia internasional untuk segera melakukan intervensi. SNC menyerukan untuk dilakukannya intervensi militer oleh PBB ke Suriah (Sulaeman, 2013).

Pilihan AS untuk mendukung NSC dan FSA merupakan perwujudan politik luar negeri AS yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan untuk menanamkan pengaruh di Suriah. Demi untuk mendukung tindakan tersebut diperlukan kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, dalam hal ini AS memiliki kemampuan untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada. AS secara internasional merupakan kekuatan besar yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mendukung kelompok oposisi baik berupa senjata, amunisi, kendaraan tempur, serta segala perlengkapan perang canggih yang dapat disalurkan ke FSA untuk mengimbangi kemajuan persenjataan yang dimiliki militer Bashar al-Assad yang dipasok oleh Iran dan Suriah.

Singkatnya, SNC dan FSA merupakan instrumen yang digunakan AS demi mencapai kepentingan politik dan sebagai jalan agar agenda politik luar negeri AS bisa tercapai di Suriah. Selain itu, tujuan yang relatif tetap dari setiap kebijakan yang diambil AS terkait Timur Tengah adalah ekonomi yang berkaitan dengan sumber

daya bahan mentah, dan dari segi keamanan adalah membendung pengaruh Iran serta mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang dapat membahayakan keberlangsungan negara Israel.

B. Kepentingan Keamanan

Ancaman pada konteks dunia Internasional dewasa ini, tidak lagi membicarakan perang antara negara seperti yang terjadi pada Perang Dunia I, II dan Perang Dingin. Bagi negara besar seperti Amerika Serikat bentuk ancaman dunia memasuki *fase* baru. Lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis dan radikal merubah pandangan dunia internasional bahwa sesuatu yang perlu diwaspadai bukan lagi hanya sekedar negara tapi juga kelompok masyarakat yang mempunyai paham yang bisa meruntuhkan eksistensi negara. Amerika menyebut ancaman tersebut sebagai ancaman dari kelompok teroris yang harus dimusnahkan demi menjaga kedamaian dunia internasional.

Dalam mempertankan keamanan nasional negara masing-masing, setiap negara berupaya mengantisipasi ancaman tersebut dengan mengembangkan kekuatan militer dan sistem keamanan dan pertahanan negara. Selama ini Amerika dikenal sebagai negara yang mempunyai sistem peralatan alusista yang canggih, agen khusus seperti FBI dan CIA, serta pertahanan di dalam negara yang memuni menempatkan Amerika sebagai negara yang kebal terhadap segala bentuk ancaman. Tetapi, pada kenyataannya kelompok ancaman baru teroris menyerang dan meruntuhkan salah satu gedung yang merupakan simbol kehebatan Amerika dalam bidang ekonomi. Tragedi 9/11 membuat setiap aktor negara beranggapan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja. Atas kejadian tersebut Amerika menjadi negara terdepan dalam pemberantasan teroris demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia internasional.

1. Perang Melawan Teroris

Selama perang dingin AS dan Soviet menjadi kekuatan utama dunia yang saling menghancurkan demi mencapai posisi tertinggi. Namun, setelah runtuhnya kekuatan komunis AS muncul sebagai kekuatan unipolar di dunia yang bertahan sampai sekarang. Kejayaan AS setelah negara yang dianggap tidak tertembus oleh kekuatan luar mendapat serangan yang merobohkan gedung monumental WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Kejadian yang terjadi di WTC disebut sebagai ulah tentara jihadis Islam sehingga menjadikan Islam sebagai ancama bagi AS pada saat itu. Hal tersebut disebabkan pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut

merupakan Osama bin Laden yang dianggap AS sebagai ketua kelompok teroris (Aden, 2011).

Sejak peristiwa 9/11, AS segera mengatur kebijakan politik luar negerinya yang fokus pada upaya pemberantasan jaringan terorisme dan menyerukan perang di beberapa negara seperti Afghanistan dan Irak yang dianggap sebagai markas bagi kelompok teroris. Melihat kawasan Timur Tengah yang mayoritas negara dipimpin oleh kekuasaan tangan besi, AS menganggap hal tersebut merupakan penyebab lahirnya gerakan-gerakan islam ekstremis atau terorisme serta paham radikal anti-Barat. Berdasarkan alasan tersebut AS menghimbau diperlukannya perubahan sistem di Timur Tengah perlu adanya reformasi ke arah demokrasi di kawasan tersebut. Demi upaya tersebut AS mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas, dan HAM yang menjadi elemen moral bagi politik luar negeri AS (Aden, 2011).

Berdasarkan salah satu dari elemen politik luar negeri yang diterapkan oleh Amerika Serikat yakni *peace*, Amerika tidak akan tinggal diam jika terdapat ancaman dari pihak asing yang dianggap menghalangi kepentingan nasional negaranya. Demi mewujudkan perdamaian, Amerika memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Gerakan ekstrimis teroris dianggap oleh Amerika sebagai bentuk ancaman baru dunia internasional dewasa ini yang perlu dilenyapkan. Konflik yang terjadi di Suriah yang juga melibatkan kelompok teroris Al-Qaeda dan ISIS memberikan kesempatan bagi Amerika untuk melenyapkan kelompok tersebut dan membawa perdamaian pada dunia internasional. dimana hal tersebut sejalan dengan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yakni perang melawan teroris.

Berlanjut ke era Presiden Barack Obama, AS masih mempertahankan adanya demokratisasi di Timur Tengah. Hal tersebut sesuai dengan pidatonya pada Mei 2011 mengenai situasi yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara, Presiden Obama menyebutkan bahwa mempromosikan reformasi dan mendukung transisi ke demokrasi merupakan kebijakan AS di kawasan tersebut, seperti yang disampaikan Obama “*it will be the policy of the United States to promote reform across the region, and to support transitions to democracy*” (OBAMA, 2011).

Program demokratisasi yang dijalankan oleh AS di Timur Tengah dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala Amerika bagi negara Arab. Namun, tujuan lain AS dalam program demokratisasi saling berkaitan dengan upaya untuk

menyebarkan paham demokrasi sekaligus cara agar negara-negara Timur Tengah dapat didikte agar kepentingan pribadinya akan sumber daya alam serta ancaman terorisme dapat dihilangkan. Tidak lupa juga untuk mempertahankan kepentingan negara sekutunya yakni Israel, dengan menjadikan negara di Timur Tengah sebagai negara demokrasi maka posisi Israel di Timur Tengah menjadi sangat aman. Hal yang sama coba untuk diterapkan AS pada negara yang sedang berkecamuk yakni Suriah.

Rezim Bashar al-Assad telah membungkam kebebasan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di Suriah. Pelanggaran HAM dan pembantaian warga sipil oleh Assad menjadi perhatian dunia. Fenomena *Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara menjadi model baru bagi AS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. AS meyakini bahwa sistem demokrasi dapat menjamin setiap peristiwa kenegaraan serta perkembangan sebuah negara di bawah demokrasi dapat diarahkan sesuai kepentingan dan keinginan masyarakat. Demokrasi juga menyediakan lingkungan dimana perlindungan terhadap hak warga negara, serta demokrasi juga menawarkan perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional (Phillips, 2012).

Semakin banyaknya pihak luar yang ikut terlibat pada konflik Suriah seperti kelompok Al-Qaeda dan ISIS, maka AS semakin mendorong kelompok oposisi SNC dan FSA untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Assad. AS menginginkan adanya perubahan sistem di Suriah dari sistem otoriter ke arah demokrasi yang merupakan desakan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Upaya AS dalam mendesak pemerintahan agar bisa menjamin kebebasan warga sipil yang sebelumnya menjadi korban selama konflik di Suriah dimulai.

Jika upaya AS berhasil menjadikan Suriah sebagai negara demokratis, maka secara tidak langsung sistem politik dan ekonomi di Suriah juga akan ikut berubah, yaitu ke arah ekonomi liberal. Pada akhirnya Suriah akan menjadi negara demokratis sesuai dengan yang diharapkan AS, bukan negara demokrasi yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Suriah. Walaupun desakan oleh pihak AS terhadap negara yang dianggap melahirkan kelompok-kelompok ekstrimis harus berubah haluan ke arah demokratis akan tetapi, Suriah selalu mendapatkan dukunga dari negara besar lainnya seperti Rusia dan Cina yang merupakan lawan AS dalam kontestasi dunia internasional.

2. Mempertahankan Eksistensi Israel

Kepentingan berikutnya Amerika yakni mempertahankan dan melindungi eksistensi Israel di Timur Tengah. Faktanya, mempertahankan kepentingan Israel

merupakan tindakan yang sudah lama dilakukan oleh Amerika. Sejak terbentuknya Israel dan mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika bersama dengan Inggris merupakan dua negara besar yang menjadi pelopor terbentuknya negara Israel melalui *Deklarasi Balfour*.

Perjanjian rahasia ini dibuat antara pemerintah Inggris dan tokoh masyarakat Zionis dengan tujuan mendirikan “Rumah Nasional” bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sebelum di umumkan *Deklarasi Balfour*, pemerintah Inggris berusaha membujuk Presiden Woodrow Wilson untuk mendukung deklarasi tersebut. Awalnya Wilson menolak memberikan dukungannya terhadap rencana Inggris dan tokoh masyarakat Zionis tersebut. Amerika beranggapan bahwa dukungan tersebut nantinya akan memperkeruh hubungan antara Amerika dan Dunia Arab. Melalui desakan salah satu tokoh Yahudi di Amerika yakni Louis D. Brandeis, pada akhirnya Amerika menyetujui dan mendukung terbentuknya negara Israel di tanah Palestina.

Banyaknya tokoh Zionis berpengaruh yang menetap di Amerika membuat hubungan Amerika dan Israel semakin dalam. Kehebatan para tokoh Zionis dalam mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap kepentingan negara Israel dikenal dengan lobi Yahudi (*Jewish Lobby*). Tercatat, dari jumlah penduduk Amerika terdapat 2 persen penduduk Yahudi yang bermukim di Amerika atau sekitar 6 juta jiwa (Weir, 2017).

Pada krisis yang terjadi di Suriah kali ini, walaupun Israel tidak terlibat langsung pada konflik tersebut akan tetapi Amerika melihat ancaman terhadap Israel. Berdasarkan faktor sejarah Israel dan Suriah pernah bersitegang karena tuntutan Hafez al-Assad kepada untuk mengembalikan wilayah Daratan Tinggi Golan maupun hak-hak bangsa Arab yang lain. Tidak harmonisnya hubungan Amerika dan Suriah di masa Hafez dan Bashar secara tidak langsung membuat kepentingan dan keamanan Israel di Timur Tengah juga ikut terancam. Demi upaya menjaga eksistensi Israel dan meminimalisir segala bentuk ancaman Amerika terlibat dalam konflik Suriah demi upaya mencapai salah satu kepentingan nasional negaranya yakni mempertahankan eksistensi Israel.

CONCLUSION

Keterlibatan Amerika Serikat pada konflik Suriah bisa dilihat dari politik luar negeri AS di Timur Tengah. Adanya upaya AS untuk mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah menarik dirinya untuk ikut berkontestasi dalam konflik Suriah, hal itu agar kepentingan mereka di Timur Tengah dapat berjalan dengan baik. Sikap untuk terlibat pada konflik Suriah membawa AS memberikan dukungannya terhadap kelompok oposisi yang dianggap oleh AS sebagai perwakilan atas pemerintahan yang sah di Suriah. AS menganggap rezim Bashar al-Assad bukan lagi pihak yang mempunyai wewenang di Suriah. AS berupaya menjatuhkan pihak Assad dengan cara memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi SNC dan FSA serta AS mendorong negara-negara besar lain seperti Prancis, Inggris, dan Jerman untuk ikut melawan rezim Assad.

Dukungan yang diberikan AS terhadap kelompok oposisi berdasarkan atas kepentingan nasional AS di Suriah yakni kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan.. Pilihan AS mendukung SNC dan FSA merupakan perwujudan politik luar negeri AS yang dapat dikatakan sebagai tindakan untuk menanamkan pengaruh di Suriah. Dalam kepentingan politik AS berupaya menanamkan pengaruhnya di Suriah yang selama ini diibaratkan “duri dalam daging” bagi AS atas kebijakannya di Timur Tengah khususnya menyangkut Israel dan nuklir Iran. Kepentingan lain AS yaitu kepentingan ekonomi. AS dikenal sebagai negara maju yang dimana juga merupakan negara industri besar dunia. Sebagai negarai industri, AS membutuhkan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar untuk mengaktifkan industrinya. Selama ini AS mendapatkan bahan bakarnya di Timur Tengah yang dikenal wilayah yang kaya akan sumber alam.

REFERENCES

- Aden, F. (2011). *The Hidden History "Menguak Konspirasi yang Mengguncang Dunia"*. Yogyakarta: Pustaka Radhiya.
- Anderson, P. T. (2015, December 04). *America's "Dirty War on Syria": Bashar al Assad and Political Reform*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/298215369_Syria_Bashar_al_Assad_and_Political_Reform
- Bahar, Z. (2014). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah (The United States Endorsement to Syrian Opposition Groups). 83-87.
- extract, S. C. (2018, January 16). *Syria and Chemical Weapons 2013*. Retrieved from http://www.cbw-events.org.uk/2018-0116_SY_chrono_2013_snapshot.PDF
- Gerges, F. A. (2002). *Amerika dan Islam Politik*. Jakarta: AlvaBet.
- HOUSE, t. W. (2011, August 18). *Statement by President Obama on the Situation in Syria*. Retrieved from <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria>
- Indonesia, B. (2012, Mei Kamis). Retrieved from PBB menyatakan tentara Suriah banyak melanggar HAM: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/05/120524_un_syria
- Kompas.com. (2012, Februari 13). Retrieved from Hubungan Rusia-Suriah Amat Strategis: <https://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriah.Amat.Strategis>
- Kuncahyono, T. (2013). Anak Anak Pengobar Revolusi. In *Musim Semi di Suriah* (p. 112). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Kuncahyono, T. (2013). *MUSIM SEMI di SURIAH Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Morgenthau, H. J. (1951). *A Critical Examination of American Foreign Policy : In Defense of the National Interest*. New York: University Press of America.
- Muttaqiena, A. (2018, October 08). *Negara - Negara Konsumen Minyak Terbesar Di Dunia*. Retrieved from SEPUTARFOREX: <https://www.seputarforex.com/artikel/negara-negara-konsumen-minyak-terbesar-di-dunia-285525-33>
- NEWS, B. (2016, March 11). *Syria: The story of the conflict*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>

OBAMA, t. W. (2011, May 19). *Remarks by the President on the Middle East and North Africa*.

Retrieved from <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa>

Phillips, C. (2012, May 15). *Syria's Bloody Arab Spring*. Retrieved from

<https://cjophillips.wordpress.com/2012/05/15/syrias-bloody-arab-spring/>

Sulaeman, D. Y. (2013). *Prahara Suriah; Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: Pustaka Iman.

Weir, A. (2017, October). *Introduction to the Israel Lobby*. Retrieved from

https://ifamericaknew.org/us_ints/introlobby.html

Widjdi, F. (2010). *Menentang Amerika; Minyikap Imperialisme Amerika di Bawah Obama*. Bogor: Ak Azhar Press.